

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Bambang Sunggono. 2001. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Boedi Harsono. 1997. *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.

Ronny Hanitijo Soemitro. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Samun Ismaya. 2013. *Hukum Administrasi Pertanahan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.

Urip Santoso. 2012. *Hukum Agraria Kajian Komperhensif*. Jakarta: Kencana

Winahyu Erwiningsih. 2009. *Hak Menguasai Negara Atas Tanah*. Yogyakarta: Total Media.

Mudakir Iskandar Syah, 2015, *Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum*, Permata Aksara.

Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Sahnan, 2016, *Hukum Agraria Indonesia*, Malang , Setara Press.

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

Peraturan Menteri ATR Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah,

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Undang – Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960

### **Jurnal**

Urip Santoso, 2016, “*Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*”, Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Perspektif, Volume 21, Nomor 3.

Budi Harsono, 1990, “*Aspek Yuridis Penyediaan Tanah. Jurnal Hukum & Pembangunan*”, Volume 20, Nomor 2.

Esti Wahyukinasih, 2016, “*Sikap Masyarakat Desa Palihan Terhadap Rencana Pembangunan Bandara Internasional di Kabupaten Kulon Progo*”, Adinegara, Volume 5, Nomor 4.

Abdurrahman, 1976, “*Masalah-Masalah Hak-Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum*”, *Jurnal Hukum kepentingan umum*, Volume 2, Nomor. 4.

Baihaqi, 2014, “*Landasan Yuridis Terhadap Aturan hukum Tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*”, *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, Volume 2, Nomor 2.

Priska Yulita Raya, 2015, “*Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Dalam Mewujudkan Kemanfaatan Hukum Bagi Masyarakat*”, *Jurnal*

*Mahasiswa Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Volume 2, Nomor 4*

Roy Frike Lasut, 2013, “Pelaksanaan Bentuk Ganti Rugi Atas Tanah Menurut UU No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum”, *Lex Et Societta*, Volume 1 Nomor 4.

Sonia Fabe Berminas, 2014, “Proses Negoisasi Dalam Penetapan Ganti Rugi Pengadaan Tanah Guna Kepentingan Umum”, *Journal of Politic and Government Studies*, Volume 3 Nomor 3.

Zora Febriana Dwithia H.P, 2014 “Makna “Fasilitas Umum” Dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Bagi Masyarakat”, *Jurnal Mahasiswa Hukum Universitas Brawijaya*, Volume 3 Nomor 4.

Dikson Kristian, I Nyoman Suyatna, dan Cokorda Dalem Dahana, 2014, “*Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*”, *Kertha Negara*, Volume 2, Nomor 1.

### **Karya Ilmiah**

Andini Sekarwasita. 2014. *Skripsi* : “Implementasi Perda Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Sebagai Akibat Perubahan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Menjadi Pajak Daerah”. Semarang: Universitas Diponegoro.

Bowo, Sigit Triyoga Hari. 2012. *Skripsi*: “Tia, Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh Anggota TNI”. Jakarta: Universitas Indonesia.

Muh. Iqbal Arfadli. 2014. *Skripsi*: “Tugas Pemerintah Kota Makassar Dalam Mensertifikasi Aset daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006”. Makassar : Universitas Hasanudin.

Muhamad Abdulkadir. 2008. *Tesis*: “Indikator Pelanggaran Karya Arsitektur dan Korelasinya dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta”. Semarang: Universitas Diponegoro.

### **Internet**

Amanda Kusumawardhani. 17 September 2017. *BPN : Tidak lebih dari 50 % Aset Negara Yang Bersertifikat.*

<http://kabar24.bisnis.com/read/20140109/16/196320/url.pdf>

Multisolusi, Citraweb Digital. 3 Desember 2017. *Sejara Bandar Udara Adisutjipto Yogyakarta.* <https://gudeg.net/direktori/169/bandar-udara-internasional-adisucipto.html>.

Rio Sandy Pradana. 4 September 2017. *SERTIFIKAT TANAH : Jokowi Minta BPN kerja Siang Malam.*

<http://kabar24.bisnis.com/read/20171004/15/696043/sertifikat-tana-jokowi-minta-bpnkerja-siang-malam.pdf>

Setyo Widodo. 11 September 2017. *Kanwil DJKN Suluttengomalu Melakukan Penandatanganan Berita Acara Target Sertifikasi dengan Kanwil BPN Sulawesi Utara: Pengamanan Hukum dan Administrasi Melalui Sertifikasi BMN, Berita DJKN.* <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/pengamanan-hukum-administrasi-melalui-sertifikasi-bmn>